

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks, baik itu dari segi bahasa, budaya maupun masyarakatnya. Keanekaragaman tersebut terlihat dari ragam jenis masyarakat yang hidup di Indonesia, yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Keanekaragaman seperti itu dalam kalangan masyarakat modern lebih dikenal dengan nama masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa, dan lain-lain.

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai ragam ras dan suku bangsa. Selain penduduk asli atau pribumi, banyak juga terdapat penduduk keturunan asing. Jumlah penduduk keturunan asing ini yang terbanyak adalah berasal dari golongan keturunan Tionghoa. Secara umum dikatakan bahwa berdasarkan keturunan, di Indonesia terdapat dua klasifikasi atas orang Tionghoa yaitu jenis golongan pertama ialah Tionghoa peranakan dan jenis golongan kedua ialah Tionghoa totok.

Tionghoa peranakan merupakan orang Tionghoa yang sudah lama hidup atau tinggal di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur dengan masyarakat Indonesia. Mereka sudah dapat berbahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari dan bertingkah laku seperti orang pribumi. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Noordjanah mengenai Tionghoa Peranakan (2004, hlm. 41) bahwa:

...yang disebut peranakan adalah *pertama*, mereka yang dilahirkan dari seorang ibu dan ayah dari Tionghoa dan lahir di Hindia Belanda. Dalam ketentuan hukum kolonial Belanda, mereka masuk sebagai *Onderdaan* Belanda. *Kedua*, mereka yang lahir dari perkawinan campuran, yaitu laki-laki Tionghoa dan wanita pribumi. Sebagai anak yang diakui secara sah oleh ayahnya dan di daftarkan sebagai anak sahnya dengan diberi nama keluarga (*She*). *Ketiga*, mereka yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara

ayah pribumi dan ibu Tionghoa, dan karena pengaruh keadaan sosial dan ekonomi, diberi nama keluarga (*She*) dan mendapat pendidikan di dalam lingkungan Tionghoa.

Sedangkan, Tionghoa totok merupakan golongan masyarakat Tionghoa pendatang baru. Golongan Tionghoa peranakan menyebut Tionghoa totok dengan sebutan *Singkeh* yang berarti tamu baru, karena mereka lahir di luar Indonesia atau negeri Tionghoa dan masih berdarah murni Tionghoa, umumnya baru sekitar satu sampai dua generasi berada di Indonesia dan masih berbahasa Tionghoa sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari. Apabila ditinjau lebih lanjut, antara Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar, selain perbedaan dari waktu kedatangan dan bahasa yang digunakan, akan tetapi perbedaan lainnya terletak dalam segi kehidupan sosial ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat (1993, hlm. 87) bahwa:

Perbedaan dalam kegiatan sosial ekonomi, orang-orang totok nampaknya lebih rajin dan lebih hemat dibandingkan dengan orang-orang Tionghoa peranakan. Orang Tionghoa totok sedapat mungkin dalam segala macam pekerjaan dilakukan sendiri atau dikerjakan bersama-sama di antara keluarga sendiri. Bagi orang-orang Tionghoa peranakan telah banyak berubah, dimana pembagian kerja dan kehidupan. Hasil survey pada tahun 1957 di Jawa Barat terdapat 80,5% orang-orang Tionghoa totok bergerak dalam bidang perdagangan, 57,1% warga negara Tionghoa yang lahir di Indonesia dan 44,6% orang Tionghoa peranakan yang menjadi warga negara Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, terlihat jelas bahwa kesuksesan masyarakat Tionghoa dalam sektor ekonomi karena sikap ekonomi mereka yang rajin dan hemat dalam kehidupan ekonominya. Selain itu, sikap mereka yang sedapat mungkin dalam segala macam pekerjaan dilakukan bersama-sama di antara keluarga sendiri menjadikan mereka terlihat sangat eksklusif dan tidak mau bekerja sama dengan penduduk pribumi.

Masyarakat Tionghoa di Indonesia, baik yang telah lama datang dan menetap di Indonesia dalam proses kehidupannya masih memiliki kesamaan-kesamaan seperti masih mempertahankan, menggunakan dan meneruskan kebudayaan dan tradisi-tradisi lama dari leluhurnya. Hal tersebut terlihat dan

dapat disaksikan pada upacara perkawinan orang-orang Tionghoa, terutama Tionghoa perantauan. Pada upacara perkawinan tersebut pengantin laki-laki masih menggunakan pakaian yang biasa dipakai oleh para pemimpin kerajaan di Tionghoa pada masa dahulu. Selain itu, pada acara hari-hari besar Tionghoa atau tahun baru Tionghoa (Imlek), orang-orang Tionghoa masih banyak yang menggunakan adat-adat lama dalam proses perayaannya seperti penampilan barongsai dalam proses perayaan tahun baru Imlek, dan lain-lain.

Pada masa Pemerintahan Soekarno, keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia sangat diakui dan diperbolehkan untuk melaksanakan berbagai adat istiadat budaya leluhurnya, bahkan untuk membentuk suatu organisasi sosio-politik Etnis Tionghoa pun, Soekarno memperbolehkan. Salah satu organisasi sosio-politik yang didirikan adalah Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) pada tahun 1954. Organisasi ini berusaha untuk mendapatkan persamaan kedudukan antara sesama warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang rasnya. Baperki berpendapat bahwa orang Tionghoa merupakan satu bagian dari etnis Indonesia. Jadi, orang Tionghoa kedudukannya sama dengan etnis Indonesia lainnya seperti Jawa, Sunda, dan Minang. Dengan kata lain, orang Tionghoa tidak perlu meleburkan diri ke dalam masyarakat Indonesia.

Kehadiran organisasi Baperki bagi Etnis Tionghoa di Indonesia dianggap telah menjadi angin segar bagi perjalanan kehidupan politiknya. Pada perjalanannya Baperki berkembang menjadi organisasi massa. Organisasi ini menitikberatkan integrasi (integrasi politik), bukan asimilasi dikalangan orang Tionghoa. Namun, organisasi ini semakin condong ke kiri dan mendekati Soekarno untuk mendapat perlindungan. Politik kiri inilah yang pada akhirnya membawa Baperki musnah dan dicap sebagai organisasi terlarang setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965.

Terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 ternyata berdampak negatif pada Pemerintahan Soekarno waktu itu. Dampak tersebut berakibat pada berkurangnya kekuasaan Soekarno terhadap pemerintahannya yang kemudian ditandai dengan dikeluarkannya Supersemar tahun 1966. Pada akhirnya

Pemerintahan Soekarno pun diambil alih oleh Soeharto. Di masa pemerintahan yang baru, Etnis Tionghoa banyak sekali mengalami diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang dilakukan berupa dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur kedudukan atau eksistensi Etnis Tionghoa di Indonesia, antara lain:

1. Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Tionghoa.
2. Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE 36/Pres/Kab/6/1967 tentang Masalah Tionghoa.
3. Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa.
4. Instruksi Presiden No. 15/1967 tentang Pembentukan Staff Khusus Urusan Tionghoa.
5. Instruksi Mendagri No. 455.2-360 tentang Penataan Klenteng.
6. Keputusan Kepala Bakin No. 031/1973 tentang Badan Koordinasi Masalah Tionghoa.
7. Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan dan Perdagangan Terbitan Dalam Bahasa dan Aksara Tionghoa.
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 6/37/UPK1973 tentang Kredit Investasi Untuk Golongan Pengusaha Kecil.
9. Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Dit tentang Larangan Penerbitan dan Percetakan Tulisan atau Iklan Beraksara dan Berbahasa Tionghoa (Lopulalan dan Tukan, 2000, hlm. 29).

Selain beberapa peraturan di atas, Soeharto juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang dirasakan banyak memberatkan Etnis Tionghoa, salah satunya adalah kebijakan asimilasi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan, mengintegrasikan dan mengasimilasikan warga Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia. Di dalam kebijakan asimilasi ini, Etnis Tionghoa dianggap sebagai pendatang asing dan jika ingin hidup bersama-sama harus meninggalkan segala atribut dan identitas budayanya, kemudian membaaur dengan penduduk pribumi. Kebijakan tersebut banyak merugikan Etnis Tionghoa dan justru membuat Etnis Tionghoa ditiadakan dari karakteristiknya yang ada dalam kelompok Etnis Tionghoa, sehingga dapat dengan mudah berjalannya proses asimilasi dengan penduduk Indonesia.

Selain kebijakan asimilasi, Soeharto juga menerapkan kebijakan lain seperti kebijakan integrasi. Kebijakan integrasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan

kebudayaan Tionghoa ke dalam kebudayaan Indonesia. Mengenai konsep integrasi, Priyanto Wibowo yang dikutip Suryaman (2011, hlm. 27) mengemukakan pendapatnya bahwa:

‘Konsep integrasi yang pada prinsipnya menerima kelompok Etnis Tionghoa sebagai suatu etnis yang memiliki ciri-ciri budaya mereka sendiri sebagai bagian dari keragaman etnis dengan kebudayaannya masing-masing. Dengan demikian, Etnis Tionghoa merupakan bagian dari keragaman yang juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan etnis lainnya.’

Berdasarkan konsep integrasi di atas dapat memunculkan suatu perbedaan antara konsep asimilasi dan integrasi, namun tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengatur keberadaan, kedudukan dan eksistensi orang Tionghoa di Indonesia. Namun, penerapan kebijakan-kebijakan politik terhadap Etnis Tionghoa oleh Soeharto telah membawa Etnis Tionghoa bergerak ke dalam bidang perekonomian. Bidang perekonomian dianggap satu-satunya bidang yang tepat bagi Etnis Tionghoa, sehingga mereka memusatkan diri di bidang ekonomi. Mereka lebih diarahkan dan fokus mengembangkan perekonomian Indonesia, agar cita-cita Soeharto tentang pembangunan nasional bisa terwujud.

Pemusatan pada bidang ekonomi yang dilakukan Etnis Tionghoa pada akhirnya memunculkan para pengusaha besar dari kalangan Etnis Tionghoa. Para pengusaha inilah dalam perjalanan bisnisnya mengalami masa keemasan pada masa Soeharto. Hal tersebut disebabkan karena mereka diberikan perlindungan dan bantuan dari Soeharto dalam menjalankan bisnisnya, serta mereka dianggap memiliki hubungan dekat dengan penguasa (Soeharto), keluarga Soeharto, dan para pejabat penting di masa Soeharto. Sebagaimana dikemukakan Suryadinata (1999, hlm. 75) bahwa:

Para pengusaha yang berasal dari Etnis Tionghoa ternyata sangat berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mereka menjadi mitra yang kuat dari para investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri terutama di sektor swasta. Banyak tokoh pribumi Indonesia percaya bahwa orang Tionghoa memonopoli sektor distribusi dan karena itu menguasai ekonomi Indonesia.

Munculnya para pengusaha dan konglomerat besar Etnis Tionghoa yang dilindungi dan dibantu oleh Pemerintahan Soeharto selama kurang lebih tiga puluh tahun memang telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 7-10% pertahun. Namun, pertumbuhan ekonomi 7-10% tersebut tetap saja tidak memberikan kemakmuran yang merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Ahmad dan Suwirta (2007, hlm. 175) bahwa:

...munculnya para konglomerat besar yang diproteksi dan disubsidi oleh pemerintahan Orde Baru selama tiga puluh tahun itu memang telah mencapai tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 7-10% pertahun. Namun, tetap saja pertumbuhan ekonomi itu tidak membawa kemakmuran yang merata dan adil bagi semua masyarakat Indonesia. Kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang dan elite sosial tertentu, terutama kelompok Cina, golongan birokrat, anak-anak dan kerabat pejabat. Dengan demikian, proses *trickle down effect* yang dijanjikan dalam paradigma pembangunan ekonomi Soeharto tidak menjadi kenyataan...

Berdasarkan penjelasan di atas membuktikan bahwa konsep pembangunan yang digembor-gemborkan Soeharto ternyata membawa kesengsaraan kepada seluruh rakyat Indonesia dan hanya menguntungkan Presiden Soeharto dengan kroninya segelintir konglomerat Etnis Tionghoa. Bukan kemakmuran yang merata dan adil yang diberikan Soeharto terhadap rakyatnya, melainkan hanya menimbulkan keadaan yang merugikan rakyat seperti kemiskinan, pengangguran serta permukiman kumuh di kota-kota besar. Keadaan tersebut nantinya akan membawa ke arah munculnya rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas dan pada satu kesadaran bahwa pembangunan ekonomi yang dicanangkan Soeharto hanya lebih memihak kepada para 'elite' daripada 'rakyat'.

Situasi yang dijelaskan di atas dengan mudah digunakan oleh para provokator untuk melakukan aksi-aksi rasialis anti Tionghoa. Pemicu-pemicu dari setiap aksi tersebut secara umum sangat tidak masuk akal, antara lain insiden yang terjadi di Pekalongan pada tanggal 24 November 1995 yang disebabkan oleh seorang pemuda Etnis Tionghoa yang tidak waras disuruh menyobek kitab suci Al-Qur'an. Atau, insiden yang terjadi di Tasikmalaya pada tanggal 26 Desember

1996 yang disebabkan oleh penganiayaan anggota kepolisian kepada seorang santri, dan beberapa aksi-aksi lainnya yang terjadi di Rengasdengklok pada tanggal 27 Januari-31 Januari 1997, Tanah Abang pada tanggal 28 Januari 1997, Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 1997, dan Makassar pada tanggal 15 September 1997 (Setiono, 2008, hlm. 1081).

Pada perkembangan selanjutnya, aksi-aksi anarkis yang berujung rasialis anti Tionghoa semakin marak terjadi di Indonesia. Menurut Lane (2007, hlm. 188-189) tercatat dimulai sekitar bulan Januari 1998 sampai kejatuhan Soeharto pada akhir Mei, telah terjadi aksi seperti di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Medan (Sumatera Utara), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Purwokerto (Jawa Tengah), Jember (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Bogor (Jawa Barat), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Depok (Jawa Barat), Bandar Lampung (Sumatera), Bima (Nusa Tenggara Barat) pada tanggal 7 Februari, dan Solo (Jawa Tengah) pada tanggal 11 Februari.

Rentetan aksi-aksi anarkis yang berujung rasialis di atas nampaknya telah menimbulkan dampak yang cukup luas terhadap daerah-daerah lainnya di Indonesia, salah satunya terjadi di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Berita kerusuhan, isu-isu kenaikan harga serta kelangkaan yang terjadi pada sejumlah bahan kebutuhan pokok telah menyebar secara cepat ke daerah-daerah di seluruh Indonesia pada saat itu, sehingga aksi kerusuhan dalam kurun waktu tahun 1997-1998 mudah sekali terjadi di masyarakat Indonesia.

Dari penjelasan di atas, peneliti ingin mengkaji apa sebenarnya yang menjadi penyebab munculnya kerusuhan di Jatiwangi yang menimbulkan pengrusakan, pembakaran dan penjarahan rumah, toko serta barang-barang milik Etnis Tionghoa? Padahal kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa dan penduduk sekitar Jatiwangi sebelum terjadinya kerusuhan dapat dikatakan baik-baik saja, bahkan tidak ada masalah apapun yang menyangkut dengan kerusuhan. Maka, muncul suatu pertanyaan, apakah kerusuhan tersebut muncul karena ada suatu pemicu? Atau apakah kerusuhan tersebut ada yang menggerakkan? Jika ada

penggerak, siapa dan dari mana asal nya? Apakah ada upaya dari aparat keamanan ataupun pemerintah dalam mencegah dan mengatasi kerusuhan tersebut?

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat terpanggil untuk menggali peristiwa kerusuhan yang terjadi di Jatiwangi tersebut sebagai salah satu penelitian sejarah terutama penelitian sejarah lokal. Selain itu, peneliti merupakan masyarakat asli Jatiwangi yang sudah sepatutnya untuk menggali peristiwa sejarah yang terjadi di Jatiwangi. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk menuliskannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kerusuhan Anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998 (Sebuah Tinjauan Historis).”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah utama yang menjadi pembahasan dalam kajian penelitian, yaitu “Mengapa terjadi kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998?”. Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas, peneliti memberikan batasan-batasan masalah ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi masyarakat Jatiwangi khususnya Etnis Tionghoa sebelum terjadinya kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998?
2. Apa hal yang melatarbelakangi terjadinya kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998?
3. Bagaimana proses terjadinya kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998?
4. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka untuk menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang ada merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh peneliti. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan peristiwa kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998. Sedangkan, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran tentang kondisi masyarakat Jatiwangi khususnya masyarakat Etnis Tionghoa sebelum terjadinya peristiwa kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998, yang meliputi kondisi sosial dan ekonomi.
2. Mengidentifikasi latar belakang terjadinya kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998, yang meliputi faktor utama, faktor pendukung, dan faktor pemicu.
3. Mendeskripsikan proses terjadinya kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998, yang meliputi pemaparan kronologis peristiwa dan dampak yang ditimbulkan.
4. Menunjukkan upaya pemerintah dalam mengatasi kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi pada Februari 1998, yang meliputi upaya dari pihak keamanan, pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi kerusuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Kerusuhan Anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998 (Sebuah Tinjauan Historis)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Menambah pengetahuan mengenai Sejarah Lokal khususnya tentang kerusuhan rasial pada masa Pemerintahan Soeharto bagi peneliti maupun mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah lainnya.
2. Sebagai bahan pengembangan materi dan diskusi khususnya mengenai Sejarah Orde Baru dan Reformasi pada lingkungan Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
3. Menambah pembendaharaan arsip daerah Kabupaten Majalengka.
4. Sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan perbandingan dalam penelitian sejarah selanjutnya terutama mengenai Sejarah Pemerintahan Soeharto.

5. Menjadi bahan materi pembelajaran Sejarah SMA kelas XII program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang mengacu pada Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut:

KD : 3.5 Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi merupakan sebuah gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan sampai pada proses penelitiannya. Data yang didapatkan merupakan hasil proses penelitian melalui studi literatur, studi dokumentasi, serta wawancara yang dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi sebuah laporan dengan struktur organisasi skripsi sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan merupakan paparan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya memuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti timbul dan penting untuk dikaji oleh peneliti dilihat dari kesenjangan sosial yang nampak di dalam kehidupan masyarakat sekitar Jatiwangi dengan suatu kondisi yang ideal dari masalah tersebut sehingga dengan begitu terlihat alasan mengapa persoalan penting untuk diangkat. Selain latar belakang masalah penelitian, pada bab ini juga terdapat rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian pustaka dan landasan teoretis merupakan paparan berbagai sumber literatur serta teori yang berhubungan dengan pokok kajian atau permasalahan penelitian mengenai masyarakat Tionghoa di Indonesia, kebijakan pemerintah terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia Sejak Pemerintahan Soekarno sampai Pemerintahan Soeharto, dan kerusuhan sosial 1998.

Bab III Metode penelitian merupakan paparan langkah-langkah penelitian yang berisi metode serta teknik penelitian yang dilakukan untuk mencari dan

mengumpulkan data-data dan fakta-fakta dari peristiwa yang dikaji secara lengkap sesuai dengan prosedur penelitian dalam metodologi penelitian sejarah.

Bab IV Kerusuhan Anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998 merupakan paparan isi atau hasil analisis bukti, data, maupun fakta peristiwa yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Etnis Tionghoa di Jatiwangi sebelum terjadinya kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998, latar belakang terjadinya kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998, proses terjadinya kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998, dan upaya pemerintah dalam mengatasi kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998.

Bab V Simpulan dan saran merupakan paparan tentang simpulan isi atau hasil penelitian berupa analisis dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian serta saran terhadap permasalahan penelitian secara keseluruhan yang ditujukan pada pihak-pihak tertentu yang bersangkutan dengan penelitian.